

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari Bab I sampai Bab V, dapat diambil beberapa simpulan berikut:

1. Seluruh para elit partai politik baik partai yang berideologikan Islam, nasionalis-sekuler, maupun partai politik nasionalis-religius memandang perlu adanya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan. Mengingat aspirasi masyarakat Pamekasan yang notabene mayoritas muslim- menghendaki penerapan syariah. Hal tersebut merupakan merupakan sebuah kewajiban, sehingga para elit partai politik sebagai wakil masyarakat di dewan legislative merasa terpanggil untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Pamekasan. Hanya saja mengenai format syariah yang ideal untuk Kabupaten Pamekasan, para elit partai politik memiliki perbedaan pandangan. Para elit partai politik Islam menghendaki penerapan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan secara tekstual-normatif. Adapun dari elit partai politik nasionalis-sekuler menghendaki formalisasi syariah yang substantif. Sementara dari elit partai nasionalis-religius ada dua pandangan; yaitu elit politik Demokrat menghendaki syariah secara substansial, sedangkan elit politik PKB memiliki pandangan yang sama dengan para elit partai politik islami, yakni menghendaki formalisasi syariah yang normatif.
2. Adapun mengenai konstruksi social para elit partai Politik dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD mempunyai argumentasi yang varian dalam sistem konstruksinya mengenai upaya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan, di antaranya yaitu: *Pertama*, Konstruksi teologis elit partai Islam cenderung dogmatis dan menghendaki formalisasi syariah secara normatif-tekstual. Sementara para elit partai politik nasionalis

sekuler dan nasionalis religius, kecuali elit politik PKB dalam sistem konstruksi teologisnya lebih cenderung teologis substansial, yaitu upaya perjuangan dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam program legeslasi daerah secara substansi. *Kedua*, Konstruksi sosiologis para elit partai Islam menyandarkan argumentasinya pada Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Pamekasan. Dalam kapasitas ini para elit partai nasionalis-sekuler dan partai nasionalis-religius juga mempunyai argumentasi sosiologis yang sama dengan para elit partai Islam, hanya saja mereka menambahkan argumentasi adanya sistem demokratisasi yang dibangun di Indonesia sebagai alasan sosiologis untuk memberikan kebebasan masyarakatnya memilih hukum apa yang harus diakomodir dalam program legislasi daerah. *Ketiga*, Konstruksi politis para elit partai Islam menyandarkan argumentasi konstruksinya dengan alasan komitmen ideologis masing-masing partainya. Sementara konstruksi politik yang coba dibangun oleh para elit partai nasionalis sekuler dan partai nasionalis religius kecuali PKB cenderung pragmatistis. Adapun PKB dari partai nasionalis-religius konstruksi politisnya cenderung kompromistis antara pragmatistis dan ideologis.

B. Implikasi Teoritik

Implikasi teoritik dari hasil temuan penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai *outstanding theoretic* dalam khazanah keilmuan hukum Islam di Indonesia, khususnya mengenai persoalan formalisasi syariat Islam yang diberlakukan di daerah-daerah yang notabenehnya menghendaki upaya transformasi hukum Islam ke dalam Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten. Serta dapat memberikan paradigma baru yang transformatif dalam program legislasi daerah di Kabupaten Pamekasan ke depan.

Selain itu temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan kebijakan baru bagi para elit partai Islam di kabupaten Pamekasan yang menjadi legislator, baik dari partai Islam maupun dari partai nasionalis dalam mereaktualisasikan formalisasi

syariah di Kabupaten Pamekasan dalam kerangka Perundang-undangan Daerah yang progresif. Serta yang paling penting adalah, varian pola konstruksi sosial yang terbangun dalam sistem perilaku masing-masing elit partai dapat menjadi gambaran kongkrit bagi masyarakat Pamekasan Madura.

C. Keterbatasan Penelitian

Dengan menjadikan elit partai politik sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini, maka peneliti merasa kesusahan untuk mendapatkan data secara maksimal, hal ini disebabkan mobilitas tinggi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan, sehingga intensitas interview yang peneliti lakukan cenderung singkat dan padat. Akan tetapi keterbatasan tersebut untungnya bisa diatasi dengan mengkresek pendapat mereka langsung melalui telpon atau SMS data-data yang belum sempat kami dapatkan.

Sebagaimana paradigma serta teori yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu paradigma alamiah dengan teori konstruksi sosial, pada satu sisi ternyata belum mampu menghasilkan temuan-temuan teoritik metodologik, yaitu sebuah temuan teoritik yang dibangun melalui uji hipotesis. Namun demikian pada sisi yang lain, penelitian ini telah berhasil membangun teori substantif, yaitu teori yang dibangun di atas kerangka data empiris. Atas dasar itu, beberapa konsep maupun proposi-proposisi yang berhasil kami temukan dalam penelitian ini, ternyata baru memasuki ranah hipotetik, yang meniscayakan secara intensif adanya kajian-kajian dengan tema yang sama lebih lanjut.

D. Rekomendasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sengaja hanya menekankan upaya memahami bagaimana relasi atau kaitan antar variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu kaitan antara para elit partai politik baik yang berideologi islami, nasionalis sekuler maupun partai politik yang berideologikan nasionalis religius dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam serta terhadap implikasi pemahamannya. Bukan bermaksud secara detail untuk menguji

hubungan antar variabelnya. Dengan demikian rekomendasinya untuk para peneliti selanjutnya agar mampu menjelaskan lebih riil dari hasil uji antar variabel tersebut.

